

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Pati dengan luas wilayah 150.368 ha. Wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0 – 1.000 m di atas permukaan air laut. Ketinggian wilayah yang terendah di Kabupaten Pati berada di Kecamatan Tayu dengan ketinggian 1 m di atas permukaan laut dan tertinggi berada di Kecamatan Tlogowungu dengan ketinggian 624 m di atas permukaan air laut. KPP Pratama pati membawahi 21 kecamatan yang terdiri dari 404 desa. Tercatat sampai tahun 2015 jumlah wajib pajak sebanyak 172.787 wajib pajak orang pribadi karyawan dan 44.302 wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Tabel 4.1

Daftar kecamatan di kabupaten pati:

NO	Kecamatan	Jumlah desa
1	Batangan	18
2	Cluwak	13
3	Dukuhseti	12
4	Gabus	23
5	Gembong	11
6	Gunungwungkal	15
7	Jaken	21
8	Jakenan	23
9	Juwana	29

NO	Kecamatan	Jumlah desa
10	Kayen	15
11	Margorejo	18
12	Margoyoso	22
13	Pati	28
14	Pucakwangi	20
15	Sukolilo	17
16	Tambakromo	18
17	Tayu	22
18	Tlogowungu	15
19	Trangkil	16
20	Wedarijaksa	18
21	Winong	30

Sumber : Data KPP Pratama Pati

Kabupaten Pati memiliki wilayah, di sebelah selatan dibatasi wilayah Kab.Grobogan dan Kab. Blora, di bagian barat dibatasi wilayah Kab. Kudus dan Kab. Jepara, di bagian timurdibatasi wilayah Kab.Rembang dan Laut Jawa, dan bagian utara adalah dibatasi wilayah Kab.Jepara dan Laut Jawa. KPP Pratama Pati hanya memiliki wilayah kerja Kabupaten Pati dan lokasi kantor juga sudah berada di Kabupaten Pati dekat denga perkantoran kejaksanaan Pati, Kantor satlantas Pati, maupun kantor kodim Pati di jl jendral sudirman no. 64 Pati, sehingga KPP Pratama Pati tidak memiliki Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) maupun Pos Pembantu.

2. Kedudukan, Potensi, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Pati

1) Kedudukan KPP Pratama Pati

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati yang selanjutnya dalam keputusan Menteri Keuangan disebut KPP Pratama Pati adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah tanggung jawab langsung kepala kantor wilayah, KPP Pratama Pati dipimpin oleh seorang kepala kantor yaitu Ir. Jufri Jauhari. KPP Pratama Pati dibangun dipusat kota Pati yang terdiri kokoh dengan satu lantai yang memiliki beberapa ruangan untuk melayani masyarakat dalam menyelesaikan pembayaran pajaknya. Dibagian selatan ruangan digunakan untuk Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Tempat Layanan Terpadu, dan dibagian lainnya digunakan untuk Kepala KPP, Sub Bagian Umum, seksi Waskon IIV, seksi penagihan, seksi ekstensifikasi, seksi pemeriksaan, ruang fungsional pemeriksaan, ruang rapat kepala KPP, ruang konsultasi, dan gudang ATK.

2) Potensi Pajak KPP Pratama Pati

Dari segi potensi pajak sebenarnya Kabupaten Pati memiliki potensi cukup besar karena wilayahnya berada di daerah pantura dan banyaknya masyarakat Pati yang memiliki usaha sendiri terlebih di Pati juga ada perusahaan besar. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang berada di wilayah Kabupaten Pati, perusahaan tersebut antara lain : PT

Paragon Technology & Inovation, PT Ungaran Sari Garmen, PT Gunanusa Era Mandiri, CV. Sambung Nyowo Yogyakarta Group, PT. Asiadaya Abadi, PT. Krida Multi Niaga Prima, PT Part Station , PT. Mandala Multifinance Tbk, PT. Columbindo Perdana Cabang Kudus, PT. Kridha Multi Niaga Prima, PT. Central Santosa Finance, PT. Yamaha Mataram Sakti, CV. Media Inovasi, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk , PT. Astra International, PT. Garudafood Putra Putri Jaya, PT. Ultrajaya, CV Arjuna Masster Corporation, PT Dua Kelinci,dan lain sebagainya.

Sebagai Kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Pati mempunyai perkembangan yang pesat. Namun demikian, potensi pajak di Kabupaten Pati tidak tersebar secara merata ke seluruh 21 kecamatan yang ada. Daerah yang berpotensi tinggi yaitu Kecamatan Pati, sedangkan yang lain dapat dikategorikan dalam tingkat sedang sampai minim potensi. Tentunya untuk wilayah yang berpotensi cukup tinggi diperlukan *Account Representative* (AR) yang lebih banyak sehingga bisa melakukan penggalan potensi pajak yang lebih besar lagi. Untuk potensi PPh orang pribadi, mayoritas dari wajib pajak PPh Orang Pribadi (orang perorang) di KPP Pratama Pati adalah mereka yang memasukan SPT dalam *Prominent 1770 SS*.

3) Tugas Pokok KPP Pratama Pati

KPP Pratama Pati memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak negara serta pengawasan wajib pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak-pajak negara yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

4) Fungsi KPP Pratama Pati

KPP Pratama Pati memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak serta memberikan penyuluhan perpajakan agar wajib pajak mengerti tentang perpajakan. Dalam melakukan tugasnya KPP Pratama Pati menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.

- d) Penyuluhan pajak.
- e) Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- f) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- g) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- h) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- i) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- j) Pelaksanaan intensifikasi.
- k) Pembentukan ketetapan pajak.
- l) Pengurangan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Visi dan Misi KPP Pratama Pati

1) Visi KPP Pratama Pati

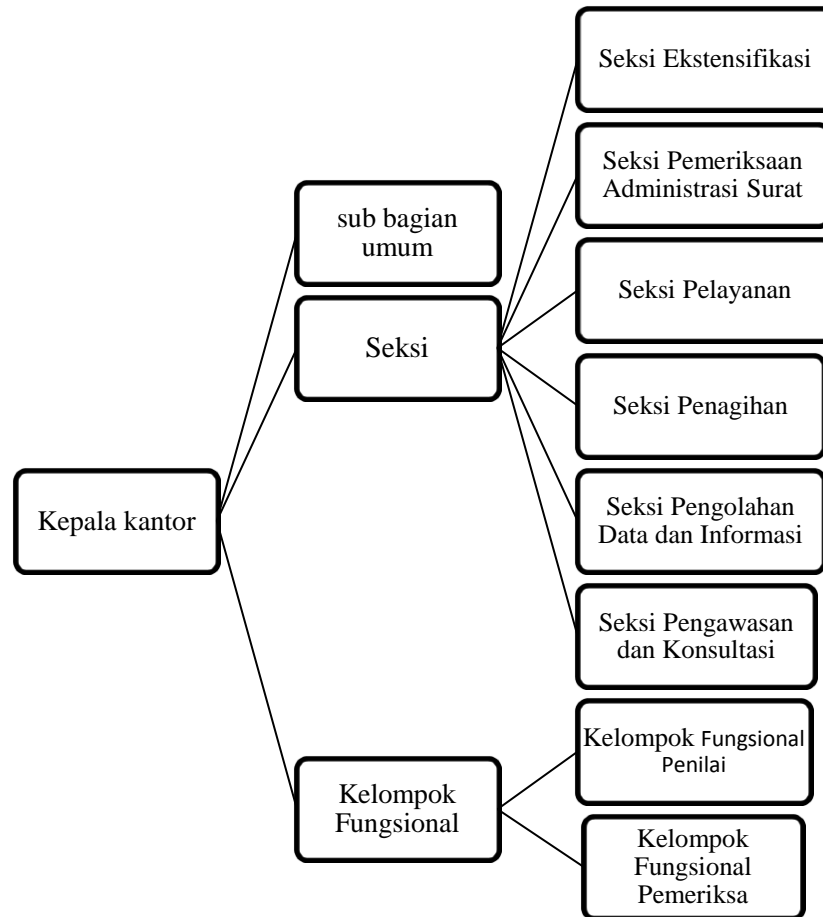
Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

2) Misi KPP Pratama Pati

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- a) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
- b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional
- d) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

4. Gambaran Umum Struktur Organisasi KPP Pratama Pati



Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Pati

5. Pembagian Tugas Pokok KPP Pratama Pati

KPP Pratama Pati dipimpin oleh seorang kepala kantor. KPP Pratama Pati terdiri dari 9 seksi dan 1 kelompok fungsional. Adapun deskripsi jabatan sebagai berikut :

1) Kepala Kantor

Dalam menjalankan tugasnya kepala kantor mempunyai tugas antara lain :

- a) Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di KPP Pratama Pati Yogyakarta sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para kepala seksi di KPP Pratama Pati.

2) Sub Bagian Umum

Dalam menjalankan tugasnya Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain :

- a) Menerima, memproses, menatausahakan dokumen yang masuk dan menyampaikan dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b) Melaksanakan tugas tata usaha kepegawaian agar pegawai menerima hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Mengkoordinasikan penataan berkas arsip umum (non wajib pajak) di lingkungan KPP Pratama Pati agar dokumen dapat disimpan dengan baik, tertib, aman serta memudahkan pencarian kembali.
- d) Memproses permohonan magang ataupun permohonan ijin, permintaan data dari mahasiswa.

- e) Melaksanakan pengetikan dan reproduksi surat-surat dinas yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dan dokumen lainnya guna menunjang kelancaran tugas KPP.
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi Draft Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g) Menyusun laporan atau draft laporan realisasi anggaran belanja, menyusun laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), melaksanakan penutupan buku kas umum.
- h) Melaksanakan pengurusan gaji, Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN), Surat Pertanggung jawaban (SPJ), pengajuan uang makan PNS, permohonan uang duka wafat, permintaan dan pembayaran lembur, membuat surat pemberitahuan gaji dan TKPKN serta merencanakan, membuat program seleksi penerimaan dan pengangkatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan.
- i) Mengkoordinasikan penginventarisan alat perlengkapan kantor atau formulir sesuai dengan kebutuhan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- j) Mengkoordinasi perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor atau formulir sesuai dengan batas kewenangan KPP berdasarkan rencana dan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

k) Mengkoordinasikan rencana penghapusan inventaris kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

l) Menyusun usulan pelelangan barang inventaris yang telah mendapat keputusan penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

a) Melayani wajib pajak dalam pendaftaran dan percetakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

b) Melayani wajib pajak dalam urusan cetak massal Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

c) Melayani wajib pajak dalam hal validasi PBB.

d) Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT tahunan orang pribadi dan badan mulai dari membuat tanda terima, menyerahkan tanda terima, merekam SPT, mencetak Lembar Pengawas Arus Dokumen (LPAD) dalam mengisi SPT luar KPP melalui pos.

e) Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT masa

f) Memberikan pelayanan *VAT Refund* kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

4) Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melakukan urusan pendaftaran wajib pajak.

b) Melakukan urusan penambahan jumlah wajib pajak.

c) Melakukan urusan penghapusan NPWP.

5) Seksi Pemeriksaan Administrasi Surat

Seksi pemeriksaan Administrasi surat mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Mengkoordinasikan pembuatan rencana pemeriksaan.

b) Mengkoordinasikan pengusulan wajib pajak yang akan diperiksa.

c) Mengkoordinasikan penerbitan surat perintah pemeriksaan pajak

d) Mengkoordinasikan peminjaman berkas dan data pajak dari seksi pelayanan pajak.

e) Mengkoordinasikan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan nota perhitungan.

f) Mengkoordinasikan penerbitan surat perintah pemeriksaan.

g) Mengkoordinasikan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan alat pengiriman.

h) Mengkoordinasikan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan dalam rangka penanguhan pajak (*Delinquency Audit*).

i) Mengkoordinasikan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang dan permohonan SPT pajak patuh.

6) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Pencairan tunggakan PPh, PPN, dan PBB.

b) Mengadministrasikan surat masuk.

- c) Melakukan penyiapan surat penagihan aktif.
- d) Pembinaan/penataan berkas wajib pajak.
- e) Konfirmasi tunggakan.
- f) Rekonsiliasi piutang pajak.

7) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi PDI mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
- b) Melakukan pengalihan potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta menyusun monografi pajak.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.
- b) Pengamatan potensi perpajakan wilayah dan membantu KPP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

9) Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional terbagi menjadi 2 yaitu Kelompok Fungsional Penilai dan Kelompok Fungsional Pemeriksa. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut :

- a) Kelompok Fungsional Penilai : menilai objek pajak milik objek PBB.

- b) Kelompok Fungsional Pemeriksa : memeriksa kewajiban pajak PPh dan PPN dan melayani wajib pajak untuk objek pajak yang melakukan keberatan, setelah menerima surat keberatan

B. Uji Kualitas Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	11	3.64	4.33	3.9881	.29198
JWP	11	10.28	11.77	11.2707	.45766
JSSP	11	11.62	12.46	11.8983	.26387
JPPP	11	4.42	5.09	4.7325	.22869
Valid N (listwise)	11				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat statistik deskriptif dari data yang digunakan dalam penelitian dengan periode 2005-2015. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 11 sampel. Variabel jumlah penerimaan pajak penghasilan memiliki nilai minimum 4,42 ; nilai

maksimum 5,09; dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,7325 dan standar deviasi sebesar 0,22869.

Variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 3,64 ; nilai maksimum 4,33; dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,9881 dan standar deviasi sebesar 0,29198.

Variabel jumlah Wajib Pajak memiliki nilai minimum 10,28; nilai maksimum 11,77; dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,2707 dan standar deviasi sebesar 0,45766.

Variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki nilai minimum 11,62 ; nilai maksimum 12,46; dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,8983 dan standar deviasi sebesar 0,26387.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06348504
	Absolute	.249
Most Extreme Differences	Positive	.133
	Negative	-.249
Kolmogorov-Smirnov Z		.825
Asymp. Sig. (2-tailed)		.505

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.3. menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Didapatkan dari hasil bahwa nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,505 lebih besar dari α (0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.113	1.946		1.600	.154
1 KWP	-.024	.087	-.160	-.276	.790
JWP	-.067	.042	-.701	-1.589	.156
JSSP	-.186	.116	-1.116	-1.604	.153

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai sig pada masing-masing variabel lebih besar dari alpha (0,05). Variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,790; jumlah Wajib Pajak sebesar 0,156; jumlah surat

setoran pajak sebesar 0,153. Jadi disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Dalam uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson* (D-W). Jika nilai DW berada diantara du dan $4-du$ berarti tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.961 ^a	.923	.890	.07588	2.021

a. Predictors: (Constant), JSSP, JWP, KWP

b. Dependent Variable: JPPP

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan pada tabel 4.5. dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* (D-W) sebesar 2,021 lebih besar dari batas atas (du) 1,928 dan

lebih kecil dari $4-du$ ($4-1,928$) yaitu $2,072$. Hal ini berarti model regresi di atas tidak ada masalah autokorelasi ditunjukkan dengan angka *Durbin Watson* (D-W) berada antara du tabel dan ($4-du$ tabel), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Dalam model regresi ganda terdapat suatu hubungan linear antara peubah X maka dapat disebut Multikolinearitas. Pendeteksian uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai *variance inflation factors* (VIP), dengan kriteria pengujian yaitu jika nilai $VIP < 10$ maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
	Coefficients		Coefficients			Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-7.873	3.672		-2.144	.069		
KWP	.733	.165	.936	4.454	.003	.249	4.010
JWP	.337	.080	.674	4.208	.004	.429	2.331
JSSP	.495	.219	.571	2.260	.058	.173	5.795

a. Dependent Variable: JPPP

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan padaa tabel 4.6. diketahui bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih dari 10. VIF masing-masing variabel independen adalah kepatuhan Wajib Pajak sebesar 4,010, jumlah Wajib Pajak 2,331, dan jumlah surat setoran pajak 5,795. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan unntuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel independen kepatuhan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak, jumlah surat setoran pajak terhadap jumlah penerimaan pajak

secara parsial. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7.873	3.672		-2.144	.069
1 KWP	.733	.165	.936	4.454	.003
JWP	.337	.080	.674	4.208	.004
JSSP	.495	.219	.571	2.260	.058

a. Dependent Variable: JPPP

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari tabel 4.7. maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$JPPP = -7,873 + 0,733KWP + 0,337JWP + 0,495JSSP$$

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa semua variabel yaitu kepatuhan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak, jumlah surat setoran pajak memiliki pengaruh kearah positif terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Koefisien determinasi (Adjusted R Square)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.961 ^a	.923	.890	.07588	2.021

a. Predictors: (Constant), JSSP, JWP, KWP

b. Dependent Variable: JPPP

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa Adjusted R Square (R^2) adalah 0,890. Hal ini berarti bahwa 89% variabel penerimaan pajak dapat dijelaskan dengan variabel independen yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak, dan jumlah surat setoran pajak. Sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Uji Simultan (Uji statistik f)

Uji statistik f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik f dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.
 Hasil Uji Statistik *f*

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.483	3	.161	27.944	.000 ^b
Residual	.040	7	.006		
Total	.523	10			

a. Dependent Variable: JPPP

b. Predictors: (Constant), JSSP, JWP, KWP

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan pada Tabel 4.9 dapat di lihat nilai F_{hitung} sebesar 27,944 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa semua variabel independen yaitu jumlah kepatuhan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak, jumlah surat setoran pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan.

3. Uji Parsial (Uji Statistik *t*)

Uji statistik *t* digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil dari uji statistik *t* dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.
 Hasil Uji Statistik *t*

Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7.873	3.672		-2.144	.069
1 KWP	.733	.165	.936	4.454	.003
JWP	.337	.080	.674	4.208	.004
JSSP	.495	.219	.571	2.260	.058

a. Dependent Variable: JPPP

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$JPPP = -7,873 + 0,733KWP + 0,337JWP + 0,495JSSP + \varepsilon$$

Berdasarkan tabel 4.9 hasil pengujian hipotesis satu sampai tiga dijelaskan sebagai berikut:

a. Hipotesis Pertama (H_1)

Dari hasil uji parsial (uji statistik *t*) pada tabel 4.9 menunjukkan variabel kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai sig 0,003 < 0,05 dan arah koefisien regresi positif 0,733 yang berarti bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib

Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015 dinyatakan diterima.

b. Hipotesis Kedua (H_2)

Dari hasil uji parsial (uji statistik t) pada tabel 4.9 menunjukkan variabel jumlah Wajib Pajak mempunyai nilai sig $0,004 < 0,050$ dan arah koefisien regresi positif 0,337 yang berarti bahwa variabel jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015 dinyatakan diterima.

c. Hipotesis Ketiga (H_3)

Dari hasil uji parsial (uji statistik t) pada tabel 4.8 menunjukkan variabel jumlah surat setoran pajak mempunyai nilai sig $0,058 > 0,050$ dan arah koefisien regresi positif 0,495 yang berarti bahwa variabel jumlah surat setoran pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa jumlah surat setoran pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015 ditolak.

Tabel 4.10

Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015	Diterima
H ₂	Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015	Diterima
H ₃	Jumlah surat setoran pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015	Ditolak

C. Pembahasan

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat menjamin untuk memperbesar pendapatan pajak di Indonesia.

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan pajak dalam

negeri dimana pajak penghasilan orang pribadi termasuk didalamnya. Salah satu syarat bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya adalah dengan mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Penerimaan pajak penghasilan sangat dipengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dengan kata lain kepatuhan wajib pajak akan menciptakan kondisi yang mendukung pencapaian realisasi penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi (2011) ditunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan dan kuat antara kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dan Anti (2014) menunjukkan hasil bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajaknya.

2. Hipotesis Kedua

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak menjamin untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak merupakan

salah satu unsur pokok dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Semakin banyak wajib pajak maka penerimaan semakin tinggi karena wajib pajak sadar akan menghitung pajak terutangnya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan sebaliknya, banyaknya Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan pajak karena banyaknya jumlah Wajib Pajak apabila mereka patuh dalam melaksanakan perpajakannya akan menambah penerimaan pajak, banyaknya Wajib Pajak di Indonesia terutama di Kabupaten Pati yang patuh dalam melaksanakan perpajakan. Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajak umumnya mereka yang mengerti dan memahami tentang perpajakan, dan mereka mengerti adanya pengenaan sanksi perpajakan jika mereka tidak melaksanakan pembayaran. Sehingga banyaknya Wajib Pajak ditambah adanya sosialisasi perpajakan dari pemerintahan dan menyebabkan Wajib Pajak mengerti tentang pajak maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2013) melakukan penelitian yang sama dan menunjukkan hasil bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anti (2014) pun menunjukkan hasil yang sama yaitu jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak maka semakin banyak pula pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang diterima.

3. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah surat setoran pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah surat setoran pajak tidak dapat menjamin untuk meningkatkan tingkat penerimaan pajak di Indonesia.

Surat setoran pajak merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo,2011). Surat setoran pajak ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, semakin banyak surat setoran pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak maka akan semakin banyak pula bukti pembayaran pajak yang berarti penerimaan pajak yang diterima pemerintah juga semakin banyak, tetapi banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengetahui tentang surat setoran pajak sehingga banyaknya Wajib Pajak yang tidak menyetorkan surat setoran pajak ketempat pembayaran yang telah ditetapkan, hal inilah yang mengakibatkan bahwa surat setoran pajak itu tidak mempengaruhi penerimaan pajak, biarpun surat setoran tidak disetorkan jika Wajib Pajak telah membayar Pajak maka penerimaan pajak masih bisa meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2012) yaitu surat setoran pajak tidak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar..
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyak atau tidaknya jumlah surat setoran pajak maka tidak akan berpengaruh pada tingkat penerimaan pajaknya.